



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyabarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2012.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja.
2. Standar Biaya yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja tertentu.

Pasal 3

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya/harga tertinggi dan pagu jarak/fasilitas transport bagi pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perjalanan dinas dan jasa paket pengiriman barang untuk memperoleh keluaran tertentu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar menggunakan biaya/harga yang terendah.

Pasal 5

Pemilihan barang yang akan dibeli/dipergunakan disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa melebihi harga tertinggi dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka SKPD yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya resmi lain.
- (3) Pengadaan/pembelian jenis belanja barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan sepenuhnya pada SKPD yang berkepentingan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 7

Bentuk komisi dan premi yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan hanya diberikan ketika perjalanan dinas dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) Km pulang pergi.
- (2) Jarak antar kota/kabupaten dan/atau antar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pimpinan SKPD menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja.

Pasal 10

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Oktober 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 363

DAFTAR ISI

A. BELANJA PEGAWAI

1. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	1
1.1 Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan	1
1.2 Panitia/ Tim/ Pekerjaan yang dibentuk untuk memenuhi kegiatan yang bersifat khusus	1
2. Honorarium untuk Pengadaan Barang dan Jasa	3
2.1 Pejabat Pembuat Komitmen	3
2.2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3
2.3 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3
3. Honorarium untuk Konstruksi Fisik	3
3.1 Pejabat Pembuat Komitmen	3
3.2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3
3.3 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3
4. Honorarium untuk Jasa Konsultasi	4
4.1 Pejabat Pembuat Komitmen	4
4.2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4
4.3 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4
5. Honorarium Panitia Pengadaan Tanah	4
5.1 Panitia Pengadaan Tanah	4
6. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Barang dan Jasa	4
6.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4
6.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	4
7. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Konstruksi Fisik	5
7.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5
7.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	5
8. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Jasa Konsultasi	5
8.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5
8.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	5
9. Honorarium Pengelola Keuangan	5
9.1 Pejabat Pengguna Anggaran	5
9.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	5
9.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6
9.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan	6
9.5 Bendahara Pengeluaran	6
9.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu	6
9.7 Pembantu Bendahara Pengeluaran	6
9.8 Bendahara Penerimaan	6
9.9 Pembantu Bendahara Penerimaan	6
9.10 Bendahara Penerimaan Pembantu	7

9.11	Pengurus Barang	7
9.12	Pembantu Pengurus Barang	7
9.13	Penyimpan Barang	7
10.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7
10.1	Jasa Konsultasi	7
10.2	Pekerjaan - pekerjaan Khusus	8
11.	Honorarium Upah Tenaga Harian	10
11.1	Upah Harian	10
11.2	Pekerjaan Swakelola	11
12.	Uang Pembinaan	11
12.1	Tingkat Kabupaten	11
12.2	Tingkat Propinsi	11
12.3	Tingkat Nasional	11
12.4	Tingkat Internasional	11
12.5	Guru/ Pengawas Berprestasi	11
12.6	Lomba Krenova (Kreativitas Inovasi Masyarakat)	11
12.7	Festival/ Lomba Seni, Karawitan & Lomba-Beregu Lainnya	11
13.	Uang Lembur	11
13.1	Kelebihan Jam Mengajar	11
13.2	Kelebihan Jam Bekerja	12
14.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS & Bantuan Operasional	12
14.1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar PNS	12
14.2	Bantuan Pendidikan & Kursus	12
14.3	Bantuan Operasional	12
15.	Honorarium Peserta Sosialisasi/ Bintek/ Seminar/ Workshop/ Diklat	12
15.1	Peserta Seminar/ Workshop/ Sosialisasi/ Bintek/ Pembekalan dan lain-lain	12
15.2	Pengiriman Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	12
B. BELANJA BARANG DAN JASA		
1.	Belanja Bahan Pakai habis	13
1.1	Alat Tulis Kantor	13
1.2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	21
1.3	Alat-alat Listrik dan Elektronika (Lampu pijar/ Battery kering)	21
1.4	Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	24
1.5	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24
1.6	Bahan Bakar Minyak dan Gas	28
1.7	Peralatan Pemadam Kebakaran	29
1.8	Vandel, Plakat dan Cinderamata	31
1.9	Tiket dan Pulsa	31

2. Belanja Bahan / Material	37
2.1 Bahan Bangunan dan Bahan Baku Bangunan	37
2.2. Satuan Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	45
2.3 Benih dan Bibit	46
2.4 Bahan Baku Makanan dan Tekstil	63
2.5 Bahan Kimia	69
2.6. Bahan Baku Lainnya	70
3. Belanja Jasa Kantor	72
3.1 Surat Kabar/Tabloid/Majalah	72
3.2 Dokumentasi	73
3.3 Jasa Paket pengiriman Barang	75
3.4 Dekorasi	78
3.5 Sertifikasi dan Paten	78
3.6 Jasa Administrasi Kepegawaian	79
3.7 Jasa Kemanusiaan dan Pengobatan	79
3.8 Jasa Publikasi Media Elektronik	80
3.9 Jasa Publikasi Media Cetak	81
4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81
4.1 Suku Cadang, Engine Perkim IM-033/1	81
4.2 Suku Cadang Mobil/Truk	83
4.3 Suku Cadang Mesin Gilas	87
4.4 Jasa Servis Kendaraan Bermotor	87
4.5 Pajak	88
4.6 BBM, Minyak Pelumas dan Minyak Rem	88
4.7 Ban	88
4.8 Accu	90
4.9 Jasa Service Kendaraan Tak Bermotor	90
4.10 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	90
5. Belanja Cetak & Penggandaan	90
5.1 Barang Cetak dan Penggandaan	90
5.2 Fotocopy, Jilid, Laminating dan Print	102
6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	103
6.1 Sewa Sarana Mobilitas Darat	103
6.2 Sewa Sarana Mobilitas Air	103
7. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	104
7.1 Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	104
7.2 Sewa Gedung / Kantor / Tempat	104
8. Belanja Sewa Alat	105
8.1 Sewa Alat Berat	105
8.2 Sewa Alat Ukur	105
9. Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	105
9.1 Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor & Sekolah	106
10. Belanja Makanan & Minuman	106
10.1 Makanan & Minuman Harian	106
10.2 Makanan & Minuman Rapat	107

10.3	Makanan & Minuman Tamu	107
11.	Belanja Pakaian Dinas & Atributnya	107
11.1	Pakaian Dinas Harian (PDH)	107
11.2	Pakaian Sipil Harian (PSH)	108
11.3	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	108
11.4	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	108
11.5	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	108
12.	Belanja Pakaian Kerja	108
12.1	Pakaian Kerja Lapangan dan Seragam Sekolah	108
12.2	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) I Sat Pol. PP	109
12.3	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) II Sat Pol. PP	109
12.4	Seragam PDL Satpol PP Lainnya	109
12.5	PDH Sat Pol.PP	109
12.6	Kelengkapan Provos	110
12.7	Kelengkapan PHH	110
12.8	Kelengkapan Pol.PP & Aksesoris	110
12.9	Unit Pemadam Kebakaran	111
12.10	Petugas LLAJ	112
13.	Belanja Pakaian Khusus & Hari-hari Tertentu	112
13.1	Pakaian Hansip / Limas	112
13.2	Pakaian Olah Raga & Musik	112
13.3	Pakaian Adat, Ibadah & Pesta	113
13.4	Pakaian Petugas Kesehatan	114
13.5	Pakaian Petugas Pelayanan Perizinan	115
13.6	Pakaian Petugas Paskibraka	115
14.	Belanja Perjalanan Dinas	116
14.1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	116
14.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124
14.3	Belanja Perjalanan Dinas Pergi Pulang Kurang dari 6 jam	134
14.4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah antar Kecamatan	134
14.5	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	135
14.6	Belanja Pemulangan Pegawai	136
C. BELANJA MODAL		
1.	Pengadaan Alat-alat Berat, Kendaraan dan Peralatan Bengkel	137
1.1	Pengadaan Alat-alat Berat	137
1.2	Pengadaan Kendaraan Bermotor	137
1.3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	143
1.4	Pengadnan Alat Bengkel	143
2.	Pengadaan Alat Pengolah Pertanian dan Perternakan	145
2.1	Alat-alat Mesin (Pertanian)	145
2.2	Peralatan Perkebunan/ Pertanian	147
2.3	Peralatan Pengolahan Pasca Panen Perkebunan	147
2.4	Alat-alat Perternakan	148
2.5	Alat-alat Kesehatan Hewan	149
2.6	Alat-alat (IB) Inseminasi Buatan	149

2.7	Alat Produksi Perikanan	149
2.8	Penangkap Ikan	149
2.9	Alat Pengepres Jarak	149
2.10	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	149
2.11	Alat Pengendalian/ Pemberantasan Hama/ Penyakit Tanaman	150
3.	Pengadaan Peralatan Kantor	150
3.1	Numbering Machine	150
3.2	Mesin Penghisap Debu (Vacum Cleaner)	150
3.3	Alat Pemadam Kebakaran	150
3.4	Mesin Tik	150
3.5	Mesin Hitung Elektronik	150
3.6	Mesin Stensil	151
3.7	Penghancur Kertas	151
3.8	Mesin Absensi	151
3.9	Mesin Foto Copy dan Laminating	151
3.10	Porporasi	151
4.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	151
4.1	Peti Uang (Cash Box)	151
4.2	Brand kas	151
4.3	Almari Arsii (Filling Cabinet)	151
4.4	Lain-lain	151
5.	Pengadaan Komputer	152
5.1	Laptop	152
5.2	Personal Computer	163
5.3	LCD Projektor	167
5.4	Printer	169
5.5	Scanner	171
5.6	GPS Portable	171
5.7	Hard Disk External	172
5.8	Radio Wifi	173
5.9	USB Wifi	173
5.10	Monitor LCD	173
5.11	UPS (Unit Power Supley) Branded	175
5.12	Monitor	176
5.13	Hard Disk Internal	177
5.14	Perlengkapan Komputer	178
5.15	Ribbon Printer	179
5.16	Bluetooth, Jaringan Komputer & Modem	180
5.17	Komponen Komputer	181
5.18	Layar	182
5.19	Printer Multi Fungsi	182
5.20	PDA	182
5.21	Lisensi	182
5.22	Server	182
5.23	Cassing PC	182
5.24	Speaker	183
6.	Pengadaan Mebelair	183
6.1	Meja	183
6.2	Kursi	184

6.3	Almari Rak dan Bufet	185
6.4	Prodium/ Mimbar	186
6.5	Alat Percetakan	186
6.6	Roll. 0. PACT	186
6.7	Papan Nama Kantor dan White Board Komplit (Board & Stand)	187
6.8	Meubelir Perpustakaan	187
6.9	Meubelir PKD	187
6.10	Meubelir Lain-lain	187
7.	Pengadaan Peralatan Dapur	188
7.1	Peralatan Makan dan Minum	188
7.2	Thermos	189
7.3	Almari Es (Refrigerator)	189
7.4	Kompur Gas	189
8.	Pengadaan Alat-alat Elektronik	190
8.1	Projektor	190
8.2	Televisi (Berwarna)	190
8.3	Video Compact Disk (VCD)	191
8.4	Radio Cassete	191
8.5	Digital Production Mizer WJ.MX 12	191
8.6	Camera Digital	191
8.7	Cassete	192
8.8	Foto Tustel	192
8.9	Video Kamera & Handycam	192
8.10	Digital Camcoder	193
8.11	Lain-lain	193
9.	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	193
9.1	Facimile	193
9.2	Spare Part	194
9.3	PABX Sentral Telepon	194
9.4	Spare Part PABX	194
9.5	Repearter UHF / FM	197
9.6	Radio Base	197
9.7	Telepon	198
9.8	Siskomdagri	201
9.9	Alat-alat Komunikasi	201
9.10	Pengeras Suara (Loud Speaker)	202
9.11	Lain-lain	203
10.	Pengadaan Alat-alat Kesehatan / Kedokteran	204
10.1	Alat Transfusi Darah PMI	204
10.2	Alat Kesehatan	205
10.3	Peralatan Kesehatan KB	229
10.4	Peralatan Pelayanan Penyakit Menular	232
10.5	Alat Program Pelatihan PKD	232
10.6	Alat Kesehatan PKD	232
10.7	Partus Set	233
10.8	Mini Bedah Set	233
10.9	UKBM Polides Posyandu Balita & Posyandu Manula	234
10.10	Alat Kesehatan PONE	234
10.11	Alat Kedokteran Umum	235

10.12	Pengembangan Rawat Inap	237
10.13	Alat Poliklinik Gigi	238
10.14	Diagnostik Poliklinik Set	239
10.15	THT Set	239
10.16	Peralatan UGD/IGD Set	239
10.17	Alat Kesehatan Lain	240
10.18	Laboratorium	240
10.19	Ruang Perawatan	244
10.20	Alat Kedokteran Hewan	244
10.21	Peralatan Laboratorium Hewan	244
10.22	Barang Linen	245
10.23	Bahan Cuci Laundry	247
10.24	Alkes Inventaris	247
10.25	Keformasian	247
10.26	Alat-alat Radiologi	248
10.27	Pelayanan Laboratorium	248
10.28	Bedah Sentral	248
10.29	Rawat Inap	248
10.30	Rawat Jalan	248
10.31	Gawat Darurat	249
10.32	Perawatan Orang Penderita Cacat	249
11.	Pengadaan Alat-alat Laboratorium	250
11.1	Alat Laboratorium Pertanian	250
11.2	Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah	250
11.3	Alat-alat Laboratorium Bahasa	254
11.4	Alat-alat Laboratorium Bahan Bangunan	254
12.	Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dan Tugu	257
12.1	Pengambilan Sample Air	257
12.2	Konstruksi Tugu	257
13.	Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	257
13.1	Listrik dan Penerangan Jalan	257
14.	Pengadaan Buku/ Kepustakaan	262
14.1	Buku Sekolah Dasar	262
14.2	Buku SLTP	263
14.3	Buku SMU/SMK	263
14.4	Jurusan Bisnis Manajemen	264
14.5	Jurusan Teknik Elektro & Mesin	264
14.6	Jurusan Teknik Bangunan dan Perkayuan	264
14.7	Jurusan Kepariwisata	264
14.8	Semua Jurusan	264
14.9	Kamus	265
14.10	Buku-buku Lain	265
14.11	Microfilm dan CD Perundangan	266
15.	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Dan Alat Olahraga	267
15.1	Umum	267
15.2	Kebudayaan	267
15.3	Kesenian	267
15.4	Olahraga	268

16. Pengadaan Hewan/ Ternak dan Tanaman	271
16.1 Tanaman Hias	271
16.2 Tanaman Kehutanan	273
17. Pengadaan Alat-alat Persenjataan / Keselamatan	273
17.1 PHH	273
17.2 Perkakas Pemadam Kebakaran	274
17.3 Peralatan SAR	275
17.4 Lalulintas	276
18. Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	276
18.1 Pompa Air	276
18.2 Alat Penakar Hujan	276
18.3 Mesin Jahit	276
18.4 Setrika	277
18.5 Mesin Cuci	277
18.6 Jam	277
18.7 Kipas Angin	277
18.8 Air Conditioner (AC)	278
18.9 Lain-lain	278
19. Pengadaan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Trafic Light	278
19.1 Markas Jalan	278
19.2 Rambu Lalu Lintas	278
19.3 Trafic Light	279
D. BELANJA PEMELIHARAAN	282
1. Belanja Pereliharaan Jalan dan Jembatan	282
1.1 Belanja Pereliharaan Jalan	282
1.2 Belanja Pereliharaan Jembatan Timbang	282
2. Belanja Pereliharaan Bangunan Air (Irigasi)	282
2.1 Pereliharaan Irigasi	282
3. Belanja Pereliharaan Jaringan	283
3.1 Pereliharaan Jaringan Air Minum	283
4. Belanja Pereliharaan Bangunan Gedung	287
4.1 Pereliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	287
5. Belanja Pereliharaan Alat-alat Besar	288
5.1 Belanja Pereliharaan Alat-alat Besar Darat	288
5.2 Belanja Pereliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	289
5.3 Belanja Pereliharaan Kendaraan Bermotor	289
6. Belanja Pereliharaan Alat-alat Bengkel	289
6.1 Pereliharaan Alat-alat Bengkel Bermesin	289
7. Belanja Pereliharaan Alat-alat Pertanian	289
7.1 Pereliharaan Alat-alat Pertanian Bermesin	289
7.2 Pereliharaan Alat Pertanian Tak Bermesin	289

8. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	289
8.1 Pemeliharaan Alat Kantor Service	289
8.2 Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	290
8.3 Pemeliharaan Komputer	293
8.4 Pemeliharaan Meja & Kursi	293
9. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio & Komunikasi	294
9.1 Pemeliharaan Alat Studio	294
9.2 Pemeliharaan Alat Komunikasi	294
10. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran/ Kesehatan	295
10.1 Pemeliharaan Alat Kedokteran	295
10.2 Pemeliharaan Alat Laboratorium Kesehatan	295
10.3 Pemeliharaan Alat Laboratorium LH	299
11. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan	299
11.1 Pemeliharaan Buku	299
11.2 Pemeliharaan Terbitan Berkala	299
12. Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan	299
12.1 Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	299
13. Belanja Pemeliharaan / Pengelolaan Berkas & Arsip Daerah	299
13.1 Pemeliharaan Berkas	299
13.2 Arsip Dinamis In Aktif / Statis Tekstual	300
13.3 Proses Alih Media Mendiskripsi Arsip Dinamis In Aktif / Statis Non Tekstual	300
13.4 Arsip Dinamis In Aktif / Statis Non Tekstual (Foto, Peta, Gambar Teknik)	300
13.5 Proses Alih Media	300
13.6 Pengadaan Kaset Arsip C.60	300
13.7 Pembersihan Arsip dan Perawatan Arsip	300
13.8 Pemeliharaan Arsip Tekstual	300
14. Belanja Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan	300
14.1 Persiapan	300
14.2 Pekerjaan Lapangan Pemeliharaan Basis Data untuk Penyempurnaan Data Obyek Pajak	301
14.3 Pekerjaan Kantor	301
E. MONOGRAFI JARAK (berdasarkan Pasal 13 Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003) DAN FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA (berdasarkan Lampiran II Permenkeu Nomor 45/ PMK.05/2007)	
1. Jarak Antar Kota	302
2. Jarak Antar Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	303
3. Jarak Antar Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo	303
4. Jarak Antar Desa di Kecamatan Mojolaban	304
5. Jarak Antar Desa di Kecamatan Grogol	304
6. Jarak Antar Desa di Kecamatan Baki	305
7. Jarak Antar Desa di Kecamatan Bendosari	305
8. Jarak Antar Desa di Kecamatan Kartasura	306
9. Jarak Antar Desa di Kecamatan Nguter	306

10. Jarak Antar Desa di Kecamatan Tawang Sari	307
11. Jarak Antar Desa di Kecamatan Bulu	307
12. Jarak Antar Desa di Kecamatan Weru	308
13. Jarak Antar Desa di Kecamatan Gatak	308
14. Jarak Antar Desa di Kecamatan Polokarto	309
15. Fasilitas Transport bagi Pegawai dan Keluarga	310

**PERATURAN BUPATI
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
2011**

D. BELANJA PEMELIHARAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
2011**

E. MONOGRAFI JARAK DAN FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI/ KELUARGA

(berdasarkan Pasal 13 Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 dan
Lampiran II Permenkeu Nomor 45/ PMK.05/2007)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
2011**